

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING

Sekolah : SMA UNGGUL DEL
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas/Semester : XII/I
Materi Pokok : Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (2 x 30 menit)

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin	<ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis sistem perekonomian yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin2. Menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin3. Menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin
4.4 Menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

B. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran *Active Learning* peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis), proaktif (kreatif), mampu berkomunikasi, rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi.

C. Materi Ajar

Fakta : inflasi, defisit
Konsep : inflasi, etatisme, defisit, devaluasi
Prosedural : Penelitian sederhana

D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik-TPACK
Model : *Active Learning*
Metode : *Learning Star With A Question*

E. Media Pembelajaran

- Zoom Meeting, Moodle dan WA Group
- Video mengenai kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
- *Power point* mengenai kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

Alat/Bahan:

- Gawai
- Laptop
- Internet

F. Sumber Belajar

- Badrika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga
- Hapsari, Ratna. 2015. *Sejarah Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Sosial Untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga.
- Modul Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
- Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 6

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Alokasi waktu: 2 x 30 menit

Tahapan Kegiatan	Aktivitas
Pendahuluan	<p>Persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Guru mengunggah materi ajar ke <i>platform</i> moodle seminggu sebelum kbm (TPACK) <p>Orientasi:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Guru dan siswa bergabung dalam WAG. Guru memberi salam dalam WAG (PPK)➤ Guru meminta siswa untuk mengisi daftar hadir pada moodle (TPACK)➤ PIC (<i>Person In Charge</i>) <i>Zoom Meeting</i> membagikan tautan <i>Zoom Meeting</i> sehari sebelum kbm. Guru dan siswa bergabung dalam zoom meeting (TPACK)➤ Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa (PPK)➤ Guru memastikan siswa sudah membaca modul dan power point yang diunggah di moodle mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (TPACK)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa kehadiran siswa ➤ Menyampaikan tujuan pembelajaran <p>Apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas
Kegiatan Inti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu <i>learning start with question</i>. ➤ Siswa diminta untuk membaca kembali modul yang sudah diunggah guru ke moodle mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. (Literasi) ➤ Siswa diminta untuk memberi tanda pada bagian yang tidak dipahami. Dianjurkan untuk memberi tanda sebanyak mungkin. (Literasi) ➤ Siswa dipasangkan dengan temannya dan mereka menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka pelajari lewat membaca. (Kolaborasi, berpikir kritis) ➤ Seluruh pertanyaan siswa dikirim melalui <i>chat zoom meeting</i> agar semua siswa dapat saling membaca pertanyaan temannya. ➤ Siswa saling menjawab pertanyaan (Kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi) ➤ Guru memberi tanggapan terhadap jawaban siswa dan menjelaskan materi yang belum dipahami siswa secara urut agar siswa juga urut dalam memahaminya
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan penguatan materi ➤ Guru mengapresiasi sikap siswa selama proses kbm ➤ Menyampaikan topik untuk pertemuan berikutnya ➤ Memberikan salam

H. Penilaian

1. Teknik Penilaian:

- a. Penilaian sikap : Observasi/Jurnal
- b. Penilaian pengetahuan : tes tertulis
- c. Penilaian keterampilan : laporan hasil diskusi

2. Bentuk penilaian:

- a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik
- b. Tes tertulis : esay

3. Instrumen penilaian (terlampir)

Laguboti, September 2020

Mengetahui

Kepala SMA Unggul Del

Guru Pelajaran

Arini Desianti Parawi, S.Pd.

Erika Siboro, S.Pd

Lampiran 1

a. Penilaian Jurnal

Nama Peserta Didik :

Kelas / Semester :

Aspek yang diamati :

No.	Hari/ Tanggal	Kejadian	Keterangan

b. Penilaian Pengetahuan

Esay

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perkembangan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin!
2. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasinya!
3. Jelaskanlah faktor yang mengakibatkan menurunnya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin!
4. Jelaskanlah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem ekonomi terpimpin!
5. Mengapa pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi?

Pedoman Penskoran Essay

No	Jawaban	Skor
1	Keluarnya Dekrti Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur	3

	<p>ekonominya menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.</p>	
2	<p>Pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual pada tanggal 8 april 1959. Selain itu, pemerintah dengan Undang-undang (UU) No. 2 Prp tahun 1959 melakukan sanering uang pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta melalui UU No.3 Rrp tahun 1959 dar membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Penanganan laju inflasi ini terus berlangsung hingga awal 1960an dengan melakukan pembatasan kredit perbankan secara kuantitatif dan kualitatif.</p>	5
3	<p>a. Adanya kekacauan politik pada masa demokrasi liberal.</p> <p>b. Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia sehingga IMF tidak memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.</p> <p>c. Adanya kebijakan dari menteri DJUANDA yang mengurangi subsidi dan memeangkas anggaran dana pemerintah.</p> <p>d. Adanya kebijakan Soekarno yang lebih menguntungkan golongan kiri dan menolak segala</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

	hal yang berhubungan dengan dunia barat.	
4	Faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin: a. Rencana pembangunan kurang matang b. Biaya pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai c. Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan d. Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas.	1 1 1 1
5	Karena pada saat itu banyak sekali masalah-masalah antara lain : cadangan kas negara kosong, uang Jepang banyak yang beredar, unsur inkostitusional (penyimpangan konstitusi UUD 1945) yang memperparah kondisi negara, serta banyaknya pemberontakan dan gerakan ekstrim misalnya PKI, APRA, dan DI/TII.	4
	Total Skor	20

SKOR PENILAIAN

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah nilai maksimal (20)}} \times 100$$

c. Rubrik Penilaian Keterampilan (laporan)

No	Nama	Aspek yang Dinilai (<i>Historical Thinking Skills</i>)																
		Kronologis				Komprehensif				Analisis				Interpretasi				Total skor
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

SKOR PENILAIAN

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah nilai maksimal (16)}} \times 100$$

Pedoman penskoran rubrik

Indikator	1	2	3	4
Kronologis	Peristiwa disampaikan dengan tidak kronologis	Hanya beberapa bagian peristiwa yang tepat secara kronologis	Hampir seluruh bagian peristiwa disampaikan secara kronologis	Peristiwa disampaikan dengan kronologis
Komprehensif	Peristiwa tidak luas dan	Peristiwa tidak terlalu luas dan	Peristiwa cukup luas dan lengkap	Peristiwa luas dan lengkap

	lengkap	kurang lengkap		
Analisis	Tidak menganalisis peristiwa	Analisis kurang mendalam dan kurang mengena terhadap permasalahan dalam peristiwa yang dikaji	Cukup baik dalam menganalisis peristiwa sejarah yang dikaji	Menganalisis dengan baik dan mendalam peristiwa sejarah yang dikaji
Interpretasi	Tidak memberikan interpretasi sendiri terhadap peristiwa	Interpretasi kurang sesuai dengan fakta sejarah	Baik dalam menginterpretasikan fakta sehingga mampu merekonstruksi peristiwa dengan baik	Sangat baik dalam menginterpretasikan fakta sehingga mampu merekonstruksi peristiwa dengan baik

d. Materi Ajar

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.

Tugas Depernas :

Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana

Menilai Penyelenggaraan Pembangunan

Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS.

Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.

1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Tugas Bappenas adalah

Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah.

Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.

Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

Tujuan dilakukan Devaluasi :

- Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
- Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
- Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penurunan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.

- a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
- b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
- c. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.

Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :

- Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.
- Pengambilalihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.
- Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

3. Kenaikan laju inflasi

Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :

- Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.
- Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
- Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar.
- Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada.
- Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
- Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh.
- Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:

Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya :

- Inflasi semakin bertambah tinggi
- Harga-harga semakin bertambah tinggi
- Kehidupan masyarakat semakin terjepit
- Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca

pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

- Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.

1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US\$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

Kebijakan pemerintah :

Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.

13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :

Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru. Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.

4. Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena:

- Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
- Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.

Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya.

Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi Dekon adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri.

Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,

demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Pelaksanaannya:

- Peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi
- Dekon mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia
- Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok, tampak dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400 % pada tahun 1961-1962.
- Beban hidup rakyat semakin berat.
- Kegagalan Peraturan Pemerintah disebabkan karena:
- Tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US\$ 400 juta.
- Adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora.
- Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku/ barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Sehingga Indonesia mampu memepribes komoditi ekspor, dari eksport tersebut maka akan digunakan untuk membayar utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negara yang memeberikan pinjaman kepada Indonesia.

Sitoluama, September 2020
Guru Mata Pelajaran

Erika Siboro, S.Pd